

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan landasan dari semua negara demokratis dan menjadi ekspresi paling formal dari aspirasi politik masyarakat Indonesia. Karena itu, hukum harus menjamin integritas pemilu dan hasilnya, dan berbagai pihak, termasuk media harus mendukungnya. Selama periode pemilu, peran media berita dan jurnalis sebagai penginformasi, pendidik, dan pengawas kekuasaan semakin penting.

Pemilihan umum 2024 berbeda dari pemilihan sebelumnya karena pertama kalinya dilakukan serentak di Indonesia. Pemilihan umum kali ini akan diadakan pada 14 Februari 2024 yang memilih presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota. Termasuk dalamnya adalah pemilihan untuk enam partai lokal di Aceh dan pemilihan untuk empat provinsi baru yang telah melakukan pemekaran: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan, dan Papua Barat Daya.

Menurut hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perolehan suara tingkat nasional Pilpres 2024, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara (24,95%), Prabowo dan Gibran memperoleh 96.214.691 suara (58,58%), dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara (16,47%). Sehingga pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kompleksitas pemilu menimbulkan isu penting yang perlu diliput oleh jurnalis. Topik yang pertama terkait dengan stamina petugas dalam menjalankan pemilu, yang berdasarkan pada pengalaman di tahun 2019 pemilihan presiden dan legislatif secara serentak. Pada pemilu 2019 tercatat terdapat ratusan petugas yang meninggal dunia karena beban kerja

yang terlalu berat, sehingga kontestasi politik lima tahun lalu menjadi pemilu paling mengerikan dalam sejarah Indonesia (Margianto, 2023). Kemudian isu terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden terkait dengan perubahan batas usia, pada masa kampanye terselubung lewat bantuan sosial, pro dan kontra adanya dinasti politik dan bahkan sesudah masa pencoblosanpun berita terkait pilpres masih menjadi topik yang dibahas salah satunya pengajuan pencoblosan ulang pilpres disebabkan karena adanya dugaan kecurangan.

Tantangan lainnya yang umum dihadapi jurnalis dalam dua pemilu terakhir di Indonesia adalah pelanggaran etika, kekerasan kepada jurnalis, dan mis/disinformasi (Sinurat, 2023) Pelanggaran etika berita pemberitaan yang tidak berimbang dan mendukung calon tertentu, seperti penerbitan berita hanya dari satu lembaga saja, bahkan temuan lembaga survei yang tidak dapat dipercaya kredibilitasnya, dan pemimpin media yang menjadi tim sukses kandidat tertentu sehingga pemberitaan jurnalisnya terpaksa memihak kepada pihak tertentu.

Pemilihan umum menghadapi tantangan yang signifikan terhadap independensi dan kredibilitas media. Media terus berfungsi sebagai sumber pendidikan untuk pemilihan dan memegang kendali atas proses pemilu. Media tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan elit politik dan mengabaikan fungsinya sendiri. Jurnalisme politik dapat menghindari propaganda, begitu juga dengan jurnalisme borjuis dan yang berfokus pada kepentingan politisi dan pemodal kapitalis. Di mana memanfaatkan pemilu untuk melakukan tawar-menawar politik untuk mempertahankan eksistensinya baik dalam karir politik maupun bisnis.

Di Indonesia, sejumlah pengusaha muncul menjadi pemain baru dalam bisnis penyiaran televisi yang sebelumnya hanya dikuasai oleh oligarki saja. Namun, dibukannya kebebasan dalam pengelolaan media ini menimbulkan permasalahan baru, yakni konglomerasi media. Kini bisnis televisi swasta mulai berkembang pesat yakni MNC Group, Kompas Gramedia Group, Emtek Group. Sejumlah pemilik media yang menguasai beberapa media sekaligus tersebut bergabung dalam partai politik yang

ada di Indonesia seperti Hary Tanoesudibjo (MNC) di partai perindo, Surya Paloh (Media Group) dan Abdurizal Bakrie di Partai Golkar. Penguasaan media penyiaran televisi oleh segelintir pebisnis ini dapat merugikan khalayak media karena sangat berpotensi untuk memunculkan adanya monopoli informasi dan intervensi terhadap ruang pemberitaan.

Pemberitaan kampanye pemilihan presiden menjadi penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi langsung yang melibatkan partisipasi publik secara luas dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Keberimbangan informasi dan keadilan representasi adalah syarat terwujudnya ide media massa diruang publik. Namun, kenyataannya pada tahun 2014 sejumlah redaksi pemberitaan tampak tidak independen akibat tekanan pemilik media yang sekaligus juga menjadi politisi.

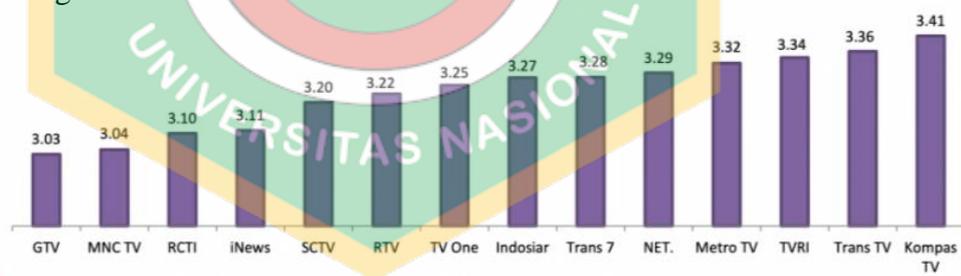
Fenomena yang dapat dilihat secara langsung dan sesuai dengan netralitas media dapat dilihat melalui penggunaan ruang publik sebagai media kampanye bagi kandidat capres, salah satunya fakta yang dapat terlihat adalah pada media swasta MNC TV yang menjadi salah satu media yang dimiliki oleh pendiri sekaligus ketua umum partai pendukung Ganjar Pranowo yaitu Perindo. Berdasarkan hasil penelitian (Hawa Shofurani, 2024) menunjukkan bahwa pemilik media memainkan peran penting dalam mendukung calon politik, pada pemilu 2024 MNC Group terus memainkan peran sebagai alat kampanye dimana MNC Group sejak lama rajin dalam menayangkan iklan partai politik dan dari segi pemberitaanpun media ini lebih condong kepada satu pihak yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh (Mukarromah, 2024) menunjukkan bahwa media online cnnindonesia.com menyajikan pernyataan dari narasumber terpercaya yang didominasi oleh anggota partai dan sebagian besar mendukung Ganjar Pranowo sehingga beritanya cenderung terkesan memihak dan mendukung tayangan di televisi yang menampilkan Ganjar Pranowo.

Fenomena bias media dalam melakukan peliputan juga terjadi pada stasiun televisi milik swasta lainnya, seperti berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zaidan Farhan, 2024) menunjukkan bahwa televisi swasta

khususnya Metro TV berusaha untuk memegang prinsip objektivitas, namun ditemukan indikasi adanya bias riangan dalam liputan, terlihat dari perbedaan frekuensi dan nada pemberitaan antara ketiga kandidat. Metro yang merupakan stasiun milik swasta yang kemudian pengelola media tersebut terjun dalam politik ternyata memberikan bias dalam peliputan berita terkait dengan pemilihan presiden, dimana diketahui pada pengelola Metro TV mendukung salah satu pasangan calon, sehingga memiliki indikasi dalam peliputan berita terkait pilpres.

Terlepas dari publik tutup mata atau bahkan membuka mata terhadap dugaan kecurangan dan kecenderungan keberpihakan beberapa media televisi terhadap pasangan calon presiden tertentu, pastinya masih terselip harapan agar media televisi dapat tetap netral dan berimbang dalam pemberitaan dan menyebarkan informasi terkait paslon yang diusung dalam pesta politik 2024.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai lembaga publik semestinya mengedepankan independensi dalam menjalankan fungsi media massa sebagaimana semestinya. TVRI bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang objektif, independen, dan mencerdaskan melalui program dan informasi yang ditayangkan, sesuai dengan undang-undang No 32 Tahun 2002.



Gambar 1.1.1 Indeks Kualitas Program Berita Televisi

Berdasarkan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode II Tahun 2023 yang dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Indeks program berita berdasarkan dimensi aktual, akurat, berimbang, faktual, dan netral menempatkan TVRI di posisi ketiga setelah Kompas TV dan Trans TV. Dari penjelasan bagan indeks penyiaran di atas TVRI sebagai lembaga

publik masih mejadi pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi terkait peristiwa yang ada.

Pada kontestasi pemilihan umum 2024 TVRI sebagai lembaga publik berkomitmen untuk menyajikan berita mengenai pemilu 2024 secara adil dan berimbang guna mencegah penyebaran berita hoaks dan provokasi yang kemungkinan dapat terjadi. LPP TVRI memengang teguh prinsip visi dan misi yang dimiliki yaitu sebagai media pemersatu bangsa melalui program dan informasi yang ditayangkan sebagaimana dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengenai penyiaran harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Isi siaranpun wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Pada pemilu 2024, TVRI hadir tidak sekedar sebagai penyampai informasi, namun juga hadir dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. TVRI berkewajiban memberikan informasi objektif secara berimbang, independen dan mencerdaskan terkait pesta demokrasi yang digelar pada 2024. Berbeda dengan televisi swasta yang mengejar keuntungan, TVRI sangat dilarang untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan semata karena sebagai lembaga publik TVRI di tuntut untuk menyajikan informasi secara independen, berimbang dan menghindari provokasi dan berita hoax.

Salah satu stasiun televisi lokal yang aktif dalam menyajikan berita terkait pemilihan umum 2024 adalah TVRI DKI Jakarta. TVRI DKI Jakarta bersiaran di kanal digital 43 UHF dan melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Banten. Program TVRI DKI Jakarta termasuk siaran lokal khusus DKI Jakarta dan relay TVRI Nasional. Meskipun stasiun televisi publik lokal TVRI DKI Jakarta wajib mejaga integritasnya sebagai lembaga informasi, eduksi dan hiburan sekaligus menjadi media pemerrsatu bangsa.

TVRI DKI Jakarta dalam menyajikan berita melalui program acara Jakarta Hari Ini, Jakarta Terkini, dan Jakarta in a week. Pada program acara Jakarta Hari Ini memiliki durasi waktu tayang selama 50 menit

dengan membaginya menjadi tiga segmen. Salah satu segmen yang wajib ada untuk memberikan informasi dan edukasi seputar pemilu adalah segmen cerdas memilih. Umumnya pemberitaan terkait dengan segmen cerdas memilih pada program acara Jakarta Hari Ini tidak hanya berisi informasi terkait daerah Jakarta saja akan tetapi pemberitaan politik secara umum juga disampaikan, seperti proses pendaftaran calon presiden, kampanye calon presiden dan juga hari pencoblosan juga turut di liput oleh TVRI DKI Jakarta.

Perbedaan penyajian berita pada program berita televisi satu dengan yang lainnya tentu tidak terlepas dari kebijakan redaksional dari suatu lembaga penyiaran. Kebijakan redaksional pada media penyiaran adalah sikap yang mempertimbangkan isi berita terhadap suatu peristiwa. Penyajian pemberitaan pada program acara Jakarta Hari Ini TVRI DKI Jakarta dituntut untuk menerapkan prinsip dan visi misi media TVRI sebagai lembaga publik. Penyajian beritanya pada TVRI DKI Jakarta mempunyai sikap dasar dalam menentukan berita yang layak untuk disebarkan. Serta berita harus bersifat objektif dan faktual yang diharapkan mampu berdampak bagi masyarakat luas sehingga memiliki nilai berita yang tinggi.

Sebagai lembaga publik yang dituntut harus mengedepankan etika dan prinsip dalam jurnalistik, akan tetapi TVRI DKI Jakarta juga memiliki tantangan dan kendala yang sama dengan media swasta lainnya. Hal yang umumnya terjadi adalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab para jurnalis masih terdapat kesalahan penulisan kemudian peralatan dan media yang masih perlu di optimalkan dan penerpaan disiplin jurnalis TVRI DKI Jakarta.

Meliput berita politik selama Pemilihan Umum 2024 tidak mudah karena ada banyak kesulitan. Menurut survei yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada tahun 2024 dalam Sinurat (Engelbertus Wendratama, 2024) Selama dua pemilu terakhir di Indonesia, jurnalis menghadapi pelanggaran etika, kekerasan terhadap mereka, dan misinformasi dan disinformasi.

Hasil survei dan fokus penelitian AJI menunjukkan bahwa masalah media umumnya adalah masalah etika, terutama ketidakpedulian terhadap "pagar api" yang membedakan iklan dan berita. Dari 1.300 jurnalis yang disurvei, hanya 54,5% menjawab bahwa menampilkan iklan politik sebagai berita merupakan pelanggaran kode etik. Selanjutnya, 45,5% menjawab bahwa mereka tidak tahu ada "pagar api" dalam jurnalisme antara pemberitaan dan iklan. Selain itu, 22,9% iklan politik diklasifikasikan sebagai berita, yang melanggar standar jurnalis.



Gambar 1.1.2 Iklan Politik Sebagai Berita

Prinsip jurnalisme sangat penting untuk menjalankan proses pesta demokrasi. Semua orang yang bekerja di dunia pers harus memahami dasar-dasar menjadi jurnalis agar berita yang mereka buat berkualitas tinggi, berisi kebenaran, dan dapat dipercaya. Sembilan Elemen Jurnalisme yang dikembangkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel adalah prinsip jurnalisme yang dapat digunakan oleh jurnalis untuk melaksanakan tugas pers mereka.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menulis sembilan hal yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis dalam buku mereka berjudul *The Elements of Journalism: What Newspeople Should and the Public Should Expect*. (Bill Kovach, 2001). Bill Kovach menciptakan dasar jurnalisme ini karena dia

menyaksikan pergeseran industri media massa ke arah di mana jurnalis bekerja untuk pemilik media dan kelompok tertentu daripada masyarakat.

Terdapat Sembilan elemen yang harus diketahui dan diterapkan yakni 1) tunduk pada kebenaran, 2) loyal pada warga 3) disiplin verifikasi 4) Independensi 5) pemantau kekuasaan 6) menyediakan forum publik 7) menarik dan relevan 8) komprehensif dan proposional 9) menggunakan hati nurani. Dari prinsip tersebut dapat menjadi acuan para jurnalis melangkah ke jalan yang sesuai guna menciptakan tujuan mendukung masyarakat berkembang ke arah kemajuan.

Berdasarkan fenomena yang ada terkait dengan isu politik Pilpres yang menjadi sorotan masyarakat kemudian adanya asumsi ketidaknetralan media secara umum dan pelanggaran etika dalam menayangkan pemberitaan terkait dengan Pemilihan Presiden 2024. Peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana proses peliputan pada media TVRI yang dipandang sebagai media kepercayaan masyarakat dalam memperoleh informasi seputar berita pemilihan umum.

Adapun alasan peneliti memilih TVRI DKI Jakarta pada berita di program Jakarta Hari Ini adalah TVRI DKI Jakarta aktif dalam memberitakan terkait dengan Pilpres 2024 kemudian TVRI masih menjadi salah satu stasiun televisi yang terpercaya dalam memberitakan terkait dengan peristiwa ada. Sehingga meskipun AJI menyebut secara umum media telah melanggar etika Jurnalistik akan tetapi TVRI sebagai lembaga publik milik pemerintah semestinya menyajikan informasi secara berimbang.

Maka dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana kenyataan prinsip jurnalisme tetap menjadi pedoman wartawan dalam meliput berita khususnya pada masa pemilihan presiden 2024. Sehingga karena inilah peneliti kemudian tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Jurnalisme Dalam Peliputan Berita Pilpres Pemilihan Umum 2024 (Studi pada Program Jakarta Hari Ini TVRI DKI Jakarta)”

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran latar belakang masalah pada sebelumnya, oleh karenanya peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan mendasari penelitian yaitu **“Bagaimana penerapan prinsip jurnalisme dalam peliputan berita pilpres pemilu 2024 pada program Jakarta Hari Ini TVRI DKI Jakarta?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip jurnalisme dalam peliputan berita Pilpres Pemilu 2024 pada program Jakarta Hari Ini TVRI DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harap dapat dimanfaatkan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi pada umumnya dan khususnya Ilmu Jurnalistik, Ilmu Teknik Reportase dan Wawancara, Manajemen Media Massa, Produksi Siaran TV, dan Teknik Mencari dan Menulis Berita. Serta berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- Kegunaan Praktis
 - Bagi TVRI DKI Jakarta, Penelitian ini diharapkan berguna bagi Institusi Pertelevisionan dalam melakukan peliputan berita di masa yang akan datang.
 - Bagi wartawan yang menekuni bidang politik, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengatasi masalah atau hambatan pada pelaksanaan peliputan berita politik khusus pada Pemilu.

- Bagi khalayak TVRI DKI Jakarta, penelitian ini berguna untuk mengetahui proses produksi peliputan berita politik khususnya pada Pemilu.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas lima sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta model kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mendalam mengenai paradigma, metode penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, teknik keabsahan data, teknik analisa data yang digunakan penelitian ini serta jadwal penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi wilayah penelitian, profil informan pokok dan kunci, penyajian data hasil penelitian, pembahasan, konfigurasi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan juga saran peneliti